

Eskalasi Konflik Palestine-Israel di Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Irfan Delta Setiawan dan Ragil Rencoko Mahesa Putra Nainggolan
Universitas Airlangga

Abstrak

Konflik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel merupakan salah satu isu yang paling sensitif dan berkepanjangan di PBB. Konflik ini ditandai dengan adanya ketegangan politik antara kedua belah pihak yang saling mengklaim hak kontrol wilayah. Konflik ini sendiri telah memaksa negara-negara besar di dunia termasuk Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Tulisan ini mengkaji tentang dua kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel di Tahun 2023. Dari dua kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi peristiwa tersebut, terlihat adanya kecondongan untuk mendukung Palestina dan mempercepat perdamaian untuk kedua negara yang terlibat konflik tersebut. Penelitian ini akan menganalisa politik luar negeri Indonesia dengan menggunakan Konsep “Kekuatan Menengah” oleh administrasi Presiden Jokowi pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisa serta mengelaborasi rasionalitas dibalik pengambilan keputusan Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam temuannya, penulis berargumen bahwa beberapa faktor yang mendasari pengambilan kebijakan-kebijakan tersebut adalah adanya solidaritas agama antara Palestina dan Indonesia, adanya sentiment anti kolonialisme yang kuat dari Indonesia, dan program 4+1 oleh Jokowi yang berfokus pada pembenahan HAM masyarakat internasional.

Kata Kunci: *Kebijakan Luar Negeri, Konflik Palestina-Israel, Solusi Dua Negara.*

Abstract

The conflict in the Middle East between Palestine and Israel is one of the most sensitive and long-standing issues at the UN. This conflict is characterized by political tension between the two parties who claim the right to control the territory. This conflict itself has forced major countries in the world, including Indonesia, to issue their foreign policies. This article examines two Indonesian foreign policies towards the Palestine-Israel conflict in 2023. From the two policies of the Indonesian government in responding to this incident, it can be seen that there is a tendency to support Palestine and accelerate peace for the two countries involved in the conflict. This research will analyze Indonesia's foreign policy using the Middle Power Concept by President Jokowi's administration in 2023. This research aims to analyze and elaborate on the rationality behind Indonesia's decision making regarding the Palestine-Israel conflict using qualitative research method. The findings find that there are several factors that underlie these policies, namely religious solidarity between Palestine and Indonesia, the strong anti-colonialism sentiment from Indonesia, and Jokowi's 4+1 program which focuses on strengthening human right issues in the international community.

Keywords: *Foreign Policy, Palestine-Israel Conflict, Two State Solution.*

Pendahuluan

Konflik antara Palestina dan Israel tentang penguasaan tanah di Timur Tengah dimulai pada akhir abad ke-19, di mana waktu itu para imigran Yahudi mulai membeli tanah di Palestina. Saat itu, tanah Palestina masih merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman (Pamuk 2009). Seiring berjalannya waktu, ketegangan pun muncul antara orang Yahudi dan Arab dikarenakan adanya persaingan klaim atas tanah tersebut (Wallach 2011). Konflik itu kemudian ditandai dengan kekerasan dan ketegangan politik kedua belah pihak yang saling mengklaim hak untuk mengontrol wilayah. Konflik yang terjadi ini mempunyai implikasi yang signifikan, baik regional maupun global yang dibarengi dengan berbagai konflik bersenjata, intervensi internasional, hingga negosiasi perdamaian.

Meskipun terdapat banyak upaya yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian di kedua kubu, konflik tersebut masih belum menemukan titik terang dan terus menimbulkan ketidakstabilan wilayah hingga saat ini. Konflik yang awalnya terfokus pada perebutan wilayah, kini meluas karena adanya dorongan beberapa faktor, diantaranya faktor etnis, kebangsaan, dan agama (Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal 2006). Pada kuartal ke-3 tahun 2023, konflik tersebut kembali memanas dikarenakan adanya kunjungan dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Ben-Gvir, yang dinilai provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa pada tanggal 27 Juli. Kunjungan tersebut bukanlah kunjungan pertama yang dilakukan. Pada bulan Mei, dia juga melakukan kunjungan yang sama. Banyak negara yang menyayangkan tindakan tersebut, salah satunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arab Saudi yang menyatakan bahwa kunjungan Ben-Gvir tersebut merupakan bentuk provokasi terhadap hukum internasional dan umat Islam di seluruh dunia (Al Arabiya 2023). Alasan utama tindakan Ben-Gvir tersebut dinilai provokatif adalah karena adanya pelanggaran terhadap *status quo* seputar Tempat Suci di Yerusalem yang telah menjadi bagian dari wacana sejak Warga Israel menetap di West Bank dan Yerusalem Timur pada tahun 1967. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan jika Pemerintah Israel hanya diperbolehkan untuk berkunjung dan hanya umat Islam-lah yang diizinkan untuk beribadah di sana.

Status hukum Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, atau yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount, merupakan titik konflik yang sering menjadi pemicu kerusuhan Palestina-Israel. Bagi Palestina dan hukum internasional, hak tanah tersebut sebenarnya cukup jelas. Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem bagian Timur, oleh karena itu mereka tidak memiliki kedaulatan atas Al-Aqsa (Zabarqa 2023). Namun, Israel memandang hal ini dengan sudut pandang yang berbeda. Meskipun hukum internasional tidak mengakui upaya apa pun yang mereka lakukan, mereka tetap nekat untuk mencaplok wilayah yang mereka duduki itu.

Shmuel Berkovits, seorang pengacara dan pakar tempat suci di Israel, mengatakan status quo yang ditetapkan pada tahun 1967 itu sama sekali tidak dilindungi oleh hukum Israel. Dia menegaskan bahwa, Moshe Dayan, selaku Menteri Pertahanan Israel yang menjabat di tahun 1967 menetapkan status quo tanpa andil dan kewenangan pemerintah Israel.

Di kuartal ke-4 tahun 2023, keadaan di Palestina Kembali memanas. Kali ini, serangan dilakukan oleh Hamas karena represif & kependudukan Israel di Palestina. Serangan itu terjadi pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023 yang dilakukan dari jalur Gaza ke wilayah kependudukan Israel. Hamas merupakan singkatan dari Harakat al-Muqawama al-Islamiya atau “Gerakan Perlawanan Islam”. Organisasi itu didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin, seorang ulama Palestina yang menjadi aktivis. Dimulai pada akhir tahun 1960an, Yassin berdakwah dan melakukan kegiatan amal di West Bank dan Gaza (Dua wilayah yang diduduki oleh Israel karena adanya *Six-Day War*). Hamas sendiri merupakan salah satu gerakan militan Islam dari dua partai politik besar di Palestina. Organisasi ini memerintah lebih dari dua juta warga Palestina di Jalur Gaza, namun kelompok ini terkenal karena perlawanan bersenjata terhadap Israel. Puluhan negara telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, walaupun sebagian hanya melabeli Brigade Izzuddin al-Qassam, sayap militer Hamas, sebagai teroris. Sebagai bentuk respon serangan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, langsung menyatakan deklarasi perang. Setidaknya, terdapat 260 korban jiwa warga Israel yang ditemukan di lokasi festival musik di gurun kibbutz (McKernan 2023). Banyak dari korban tersebut ialah warga sipil, sehingga Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menggambarkan serangan Hamas itu sebagai sebuah “serangan teroris yang membabi buta.” Serangan Hamas tersebut pun merupakan serangan perlawanan paling keras kepada Israel selama 50 tahun terakhir.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, tulisan ini akan membahas respon dan tindakan Pemerintah Indonesia terhadap dua konflik di atas. Secara khusus, penulis akan memaparkan bagaimana Indonesia menjalankan politik luar negerinya serta alasan dibalik keputusan tersebut. Tulisan ini berargumen jika *Islamic Diplomacy*, sentimen *Anti-Colonialism*, dan Pembukaan UUD 1945 mendorong Indonesia untuk membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang cenderung lebih mendesak Pemerintah Israel.

Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Bebas-Aktif Indonesia dianggap sebagai kebijakan yang unik dan langka. Bagi negara seperti Indonesia yang merdeka pada tahun 1945, negara ini dianggap sebagai negara pionir dalam politik luar negeri yang bersifat non-blok (Muzakki 2017). Hal ini membuat Indonesia cukup

populer dengan gerakan non-blok dan Konferensi Bandung pada masa Perang Dingin. Meskipun kebijakan luar negeri Indonesia dapat dilihat dengan tiga teori utama yakni realisme, idealisme, dan konstruktivisme, namun kebijakan luar negeri Indonesia diyakini lebih cenderung ke arah konstruktivisme (Muzakki 2017). Praktik konstruktivisme dalam politik luar negeri Indonesia juga bisa terlihat dari *Middle Power Diplomacy* yang sering diterapkan Indonesia, yakni sebagai mediator konflik. Konsep Bebas-Aktif ini melahirkan sejumlah kebijakan luar negeri yang bersifat membangun dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas namun tetap aktif di kancah internasional. Pada Pasal 3 UU No.37/1999, juga ditegaskan dimaksud dengan “bebas aktif” adalah sebuah politik luar negeri yang didasarkan pada kepentingan nasional Negara Indonesia guna mendukung terwujudnya tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan bukan termasuk politik yang netral (Republik Indonesia 1999). Poin yang sama pun terlihat dalam Pembukaan UUD 1945, di mana fokusnya adalah mewujudkan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Republik Indonesia 1945).

Konsep tentang Bebas-Aktif ini merupakan bentuk tulisan dari Mohammad Hatta dan dimuat di *Council on Foreign Affairs*. Konsep tersebut muncul ketika Mohammad Hatta merasa bahwa Indonesia masih terus berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang seutuhnya bahkan setelah negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya. Keinginan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi warganya mendorongnya untuk merancang kebijakan luar negeri yang dapat membuat Indonesia bertahan pada masa perang dingin. Ada lima hal mendasar yang menjadi poin terbentuknya politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, yakni (1) Membela kebebasan warga negara Indonesia dan melindungi negara itu sendiri. Poin ini sangatlah fundamental bagi negara yang saat itu baru merdeka. Mereka sadar jika kebebasan warga negara Indonesia merupakan hal mendasar untuk mempertahankan kemerdekaan negara; (2) Untuk memperoleh taraf hidup yang layak, seperti kecukupan pangan dasar seperti beras; (3) Memperoleh modal untuk membangun kembali. Hal ini digunakan untuk membangun kembali industri di Indonesia, mekanisme bertani, dll; (4) Untuk memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional dan membantu tercapainya keadilan sosial di tingkat internasional; (5) Menekankan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangga (Hatta 1953). Namun, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan pada kebijakan Nawa Cita, yang mempunyai arti “sembilan agenda”. Beberapa poin utama dari kebijakan Nawa Cita adalah memperluas maritim dan menjadi poros maritim global untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional, memerankan *middle power diplomacy* di kancah global, dan memperluas hubungan dengan kawasan Indo-Pasifik (Chen 2014).

***Two State Solution* dari Indonesia?**

Isu Palestina selalu menjadi isu krusial bagi diplomasi perdamaian yang di usung Negara Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk meredakan konflik berkepanjangan Palestina-Israel tentu tidak hanya penting bagi negara-negara di Timur Tengah tetapi juga di seluruh dunia. Presiden Jokowi kembali menegaskan jika dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkeadilan dan abadi, Palestina dan Israel hanya punya satu jalan tengah, yaitu perdamaian berdasarkan *Two State Solution* (KTT 2018). Oleh karena itu, Presiden mendorong seluruh para aktor Internasional untuk memberikan perhatian lebih bagi isu perdamaian Palestina-Israel. *Two State Solution* dalam konflik Palestina-Israel menegaskan jika Palestina dan Israel, dengan tanah di sebelah Barat Sungai Jordan, akan mendapatkan kemerdekaan mereka masing-masing. Perbatasan antara kedua negara masih menjadi sengketa dan negosiasi meskipun Palestina dan Arab menuntut penarikan penuh Israel dari wilayah yang didudukinya pada tahun 1967, yang hingga saat ini masih ditolak. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak akademisi serta actor-aktor internasional yang mulai mempertanyakan kelayakan dari gagasan *Two State Solution* ini untuk kedua negara. Dengan adanya peningkatan unilateralisme dari kubu Israel serta lemahnya yuridiksi lembaga-lembaga Palestina, kondisi yang ada kini justru mengarah pada *One State Reality* di mana Israel secara de facto memegang kendali atas semua wilayah (Barnett 2023). Tentunya kenyataan ini sangat berbanding terbalik dengan pendapat para *policymakers* seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, serta organisasi-organisasi internasional seperti PBB yang sangat ingin mengaplikasikan *Two State Solution* walaupun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Sama seperti actor-aktor di atas, Indonesia pun juga ikut menyuarakan *Two State Solution* sebagai solusi. Contohnya, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang memberikan pernyataan jika keselamatan warga sipil harus dikedepankan.

Pada saat Ben-Gvir melakukan kunjungannya ke Kompleks Al-Aqsa bulan Juli 2023, respon Kementerian Luar Negeri Indonesia terkesan sangat tegas. Ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya (1) Israel bukan pertama kalinya melakukan aksi provokasi yang dapat memperburuk stabilitas dan situasi keamanan di Kawasan; (2) Indonesia mengecam aksi provokasi Menteri Israel yang mengunjungi Kompleks Al-Aqsa tersebut dan mengatakan kalau hal itu merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional dan *status quo* Jerusalem; (3) Indonesia mendesak Israel untuk menghormati *status quo* Jerusalem, lalu menghentikan segala tindakan yang bisa semakin memperkeruh kondisi keamanan di Kawasan; (4) Indonesia juga kembali menekankan pentingnya proses perdamaian Palestina-Israel berdasarkan “Two State Solution” sesuai parameter internasional.

Vershinina (2023) berpendapat jika program *peacekeeping* negara-negara Asia Tenggara berakar kuat pada nilai-nilai yang mendasari kebijakan luar negeri dan dalam negeri mereka. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia diharapkan bisa menyumbangkan inovasi konseptual pada model program *peacekeeping* yang selama ini dijalankan dengan menggunakan perspektif Barat. Dalam kasus kunjungan Ben-Gvir, Indonesia sebagai negara yang telah melewati masa-masa dekolonialisasi mencoba untuk menanamkan pendekatan mereka sendiri ke dalam ranah internasional, yaitu desakan untuk menghentikan konflik. Kata “mengecam” pada poin ke-2 dan “mendesak” dalam poin ke-3 menegaskan jika Indonesia dengan tegas menolak provokasi yang dilakukan oleh Israel di Kompleks Al-Aqsa. Hal ini juga berbanding lurus dengan teks pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang membicarakan tentang penghapusan penjajahan di atas dunia. Vershinina (2023) juga menegaskan jika sejak tahun 1950-an, beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia juga telah berpartisipasi dalam operasi *peacekeeping program* dari PBB. Keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan konflik Thailand-Kamboja pada tahun 2008-2011 dan konflik di Kamboja pada tahun 1980-an telah mendorong perkembangan praktik pemeliharaan perdamaian regional. Dengan kontribusi di atas, Indonesia ingin meningkatkan pengaruh regional ke tingkat global. Dalam beberapa kasus, keterlibatan dalam pemeliharaan perdamaian mempunyai berbagai motivasi, yaitu mulai dari ideologi, budaya, agama, atau kebijakan luar negeri yang selaras dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik.

Solidaritas Keagamaan Palestina-Indonesia

Pada Kuartal ke-4, tepatnya tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan kejutan ke Israel. Serangan tersebut diklaim Hamas sebagai balasan atas berbagai rangkaian tindakan kekerasan Israel di Yerusalem dan West Bank. Pemukim Israel banyak yang mengambil alih rumah-rumah warga Palestina secara paksa. Selain itu, kelompok ultranasionalis Yahudi yang terus memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa untuk melakukan perjalanan spiritual yang provokatif juga disinyalir menjadi alasan lain. Mantan Komandan NATO James Stavridis menyatakan jika perpecahan politik di kubu Israel karena adanya skandal korupsi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Hal tersebut disinyalir menjadi alasan utama serangan Hamas dan para pendukungnya. Sejak awal tahun 2023, sebagai balasan dari aksi Netanyahu tersebut, protes besar-besaran setiap minggunya mulai dilakukan oleh para oposisi yang menentang rencana reformasi pemerintah. Skala protes terus meningkat dengan adanya puluhan ribu orang Israel memadati jalan-jalan di kota-kota besar maupun kecil di seluruh negeri.

Gambar 1. Linimasa Serangan Hamas ke Israel



Sumber: Guardian

Setelah adanya serangan yang diluncurkan Hamas, Netanyahu langsung mendeklarasikan perang sebagai respon cepat. Namun, kepala Institut Demokrasi Israel Yohanan Plesner menyatakan bahwa deklarasi perang tersebut sebagian besar bersifat simbolis karena mereka ingin “menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi konflik yang lebih panjang, intens dan signifikan”. Sementara itu, Israel Defence Forces (IDF) menyatakan bahwa mereka telah merebut kembali kendali atas lebih dari 20 lokasi yang diserang oleh Hamas, dengan pertempuran dilaporkan terus berlanjut di daerah Kfar Aza di mana orang-orang bersenjata dari kelompok militant Islam dilaporkan bersembunyi (Gambar 2).

Gambar 2. Operasi Serangan Israel Defence Forces



Sumber: Israel Defense Forces

Dalam pernyataan resminya, Palestina menyoroti cita-cita dan keinginannya untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan terutama dari adanya penggerebekan dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel di Masjid Al-Aqsa dan tempat suci umat Islam, Kristen serta penolakan Israel terhadap proses perdamaian. Beberapa negara memberikan respon mereka, seperti Presiden Amerika Joe Biden yang menyatakan jika Amerika Serikat mendukung penuh rakyat Israel. Kemudian, juru bicara NATO juga menyatakan jika mereka mengutuk keras serangan terror yang dilakukan Hamas terhadap mitra NATO tersebut. Mereka juga mengatakan jika tindak terorisme adalah ancaman bagi masyarakat dan Israel berhak membela diri mereka.

Sama seperti negara-negara lain, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri juga memberikan responnya terhadap serangan Hamas ke Israel, yaitu: (1) Indonesia prihatin dengan peningkatan eskalasi konflik antara Palestina-Israel; (2) Indonesia mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban; (3) Akar konflik masalah ini, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan, sesuai parameter yang sudah disepakati PBB. Hal yang sangat menarik untuk dilihat di sini adalah adanya perbedaan respon dari

Kementrian Luar Negeri pada bulan Juli dan bulan Oktober tahun 2023. Di sini, Menlu menggunakan kata “prihatin” di poin ke-1 saat Hamas memulai serangannya ke Israel. Kata tersebut cenderung bersifat lebih diplomatis dibandingkan dengan respon Menlu terhadap Ben-Gvir saat melakukan kunjungannya ke Kompleks Al-Aqsa bulan Juli 2023 lalu yang cenderung memojokkan Israel dengan kata “mengecam” dan “mendesak”.

Dibalik adanya kedua respon yang lebih condong ke Palestina tersebut, penulis beranggapan jika respon yang diberikan Kemlu didasarkan oleh adanya sentimen identitas agama dari kedua negara. Palestina dan Indonesia mempunyai sejarah yang Panjang, di antaranya adalah konflik Arab-Israel yang juga selalu dikategorikan sebagai isu penting di dalam politik luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia sangat membela hak dan kebebasan rakyat Palestina serta mendukung perjuangan rakyat Palestina. Alasan lain ialah Palestina merupakan salah satu negara awal yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Syekh Muhammad Amin al-Husaini, selaku *Supreme Leader of the Council of Palestine* saat itu sangat berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya terhadap Indonesia, khususnya melalui *Arab League*. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestina di Aljazair, 15 November 1988. Sebagai bentuk dukungan lebih lanjut, pada tanggal 19 Oktober 1989, telah ditandatangani “Joint Communique opening of diplomatic relations” antara Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi, yang sekaligus menandai peresmian Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.

Dalam kasus *E-Petition Signing*, Muhammad Abdan Shadiqi (2020) mengemukakan jika tema utama yang paling sering muncul sebagai alasan kenapa Masyarakat Indonesia mendukung Palestina adalah adanya peran identitas agama. Selain itu, analisis yang ada menunjukkan agama Islam terkait dengan solidaritas. Temuan tersebut menunjukkan jika kesamaan identitas agama di kedua negara yakni Indonesia dan Palestina dapat dikaitkan dengan solidaritas sebagai alasan penandatanganan *E-Petition* tersebut. Jika ditarik lebih ke Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, Indonesia bersama dengan Pakistan menolak tegas keterlibatan Israel dalam konferensi tersebut dengan alasan yang sama. Solidaritas antara Indonesia dengan Arab terhadap konflik dengan Israel juga tampak jelas ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games di Jakarta pada bulan September 1962. Jakarta menolak memberikan visa kepada atlet Israel. Sentimen keagamaan di kalangan umat Islam yang merupakan mayoritas di dalam negara dengan umat muslim terbanyak, tentu hal ini harus menjadi pertimbangan para pengambil keputusan politik dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Pew Global Attitudes Project (2006) menyatakan jika pelunakan sikap atau bahkan dukungsn

pemerintah Indonesia terhadap Hamas ialah untuk memenuhi tuntutan masyarakat karena mereka memberikan citra positif terhadap Hamas dan bersimpati terhadap gerakan tersebut. Solidaritas Indonesia tersebut bukanlah tidak berdasar. Kebijakan luar negeri Indonesia mempunyai kaitan yang kuat dengan opini publik meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya bisa menjadi tolok ukur terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia (Muzakki 2017).

Anti-Colonialism Sentiment

Literatur tentang politik luar negeri Indonesia tidak jauh dari pemaparan deskriptif dan kronologis yang terjadi di Indonesia. Faktanya, analisis mendalam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dari era yang berbeda akan dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Pada era Sukarno, penerapan politik luar negeri Indonesia tertumpu pada kuatnya ide dan praktiknya. Pada saat itu, Indonesia mengedepankan politik luar negeri yang koheren dan konsisten dengan kolonialisme sebagai *discourse* utamanya (Yeremia 2020). Namun, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia mengedepankan “down-to-earth diplomacy” atau biasa disebut “diplomasi pro-rakyat”, di mana Indonesia akan fokus pada urusan dalam negeri. Walaupun begitu, meskipun diplomasi pro-rakyat berfokus pada kebutuhan dalam negeri, namun keterlibatan Indonesia di kancah internasional juga lebih ditekankan (Andika 2016). Mengikuti arahan Presiden mengenai pendekatan kebijakan luar negeri pro-rakyat, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan pendekatan baru tersebut pada pernyataan kebijakan tahunan pertamanya pada tanggal 8 Januari 2015 (Saleh 2014). Menurutnya, Indonesia akan berfokus pada tiga prioritas, yakni menjaga kedaulatan negara, meningkatkan perlindungan terhadap WNI, dan intensifikasi diplomasi ekonomi (Sekretariat Kabinet Indonesia 2015). Kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Teheran dan Riyadh pada tahun 2016 juga membuktikan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Kunjungan ke Timur Tengah tersebut bertujuan untuk mengambil peran aktif dalam mendorong stabilitas hubungan kedua negara. Dalam pesan tertulis, Presiden Jokowi menekankan pentingnya hubungan baik kedua negara kepada Raja Saudi Salman dan Presiden Iran Hassan Rouhani (Kwok 2016). Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dan menjadi tuan rumah OIC (Organization of Islamic Cooperation) in February 2016 dengan tujuan strategis untuk memperkuat dukungan Negara-negara Islam terhadap kebebasan Palestina. Semua ini menunjukkan komitmen dan keterlibatan kuat Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi pro-rakyat era Presiden Jokowi.

Posisi pro-Palestina sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Hak tersebut sudah dilakukan sejak era Sukarno karena kecambahnya terhadap segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan penindasan tidak manusiawi yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Posisi ini konsisten

dengan pemerintahan Indonesia hingga saat ini dan hanya mengalami perbedaan ideologi dan konteks. Dengan demikian, posisi pro-Palestina ini telah menjadi opini publik dan pada suatu titik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan masyarakat Indonesia secara luas (LukensBull & Woodward 2011). Ada dua poin utama pada pandangan Sukarno, yakni penekanan ideologinya pada nasionalisme, anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, dan kedua, penekanan terhadap *pan-islamic solidarity* untuk menyelamatkan tempat tersuci ketiga Islam (Sihbudi 1997). Ketika negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania dan Suriah memanfaatkan retorika *Pan-Arabisme* sebagai alasan untuk mendukung Palestina, Indonesia memanfaatkan identitas Muslim untuk lebih membangun koneksi dan solidaritas.

Sebuah Roadmap Politik Bebas-Aktif di Tahun 2023

Politik Luar Negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Yudhoyono berfokus untuk meraih lebih banyak keuntungan dengan mengikuti aturan main. Namun, pada era Presiden Jokowi, Indonesia kini berusaha mencapai kepentingan negara dengan cara mempengaruhi, mengubah, serta membangun aturan main dalam politik internasional (Alvian 2018). Dengan kata lain, diplomasi *middle power* yang diterapkan Indonesia mengalami pergeseran orientasi dari *relational power* menuju *meta-power* yang digagas oleh Stephen Krasner.

Ketegangan konflik antara Arab dan Israel merupakan salah satu peristiwa internasional yang menarik perhatian publik karena konflik ini melibatkan sentimen publik dengan latar belakang ideologi, keyakinan budaya atau agama. Isu tersebut bisa dimanipulasi untuk menadapatkan simpati masyarakat, khususnya umat islam di Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno, posisi Indonesia sudah sangat jelas, yakni dukungan terhadap Palestina. Walaupun banyak yang mengira jika posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Konflik Arab-Israel di era pemerintahan Sukarno berdasarkan pada nilai-nilai Islam, namun sebenarnya kebijakan Presiden Soekarno dipengaruhi oleh gagasan dialektis tentang tatanan dunia. Menurut Modelski (1963), Soekarno mengklasifikasikan tatanan dunia menjadi dua kategori; New Emerging Forces (NEFO) dan Old Established Forces (OLDEFO). Menurut Soekarno, Indonesia merupakan bagian dari Nefos bersama dengan negara-negara di Blok Timur. Gagasan tersebut lahir ketika Soekarno menghadiri Negara-Negara Gerakan Non-Blok di Baghdad, Serbia pada September 1961. OLDEFO merupakan sekumpulan negara-negara kapitalis dengan kecondongan terhadap praktik kolonialisme, seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Perancis, Inggris, serta beberapa negara Barat lainnya. Sedangkan NEFO adalah kelompok negara yang memiliki pandangan dan prinsip anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme.

Berbeda dengan era kepemimpinan Soekarno, keputusan Jokowi dalam konflik Palestina-Israel di tahun 2023 ini didasarkan pada Formula 4+1,

yakni fokus terhadap peningkatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan global. Sedangkan, plus satu berfokus tentang peningkatan infrastruktur diplomasi. Retno Marsudi (2022) menegaskan di rapat kerja Komisi I DPR RI jika prioritas Indonesia pada periode kedua kepemimpinan Jokowi adalah mengedepankan kerja sama regional dan global untuk pemajuan dan perlindungan HAM oleh masyarakat yang terdampak perang, pengikisan kedaulatan suatu negara, dan masih banyak lagi. Penegasan Jokowi dalam memastikan semakin aktifnya Indonesia di kancah Internasional juga digaungkan di KTT G20 di Bali akhir tahun 2022 lalu. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perang bisa menciptakan tragedi kemanusiaan dan melemahkan perekonomian global, menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, merusak rantai pasokan, serta mengancam stabilitas keuangan (Deklarasi G20 2022). Hal ini menjadi bukti salah satu upaya Indonesia dalam menjadikan G20 sebagai forum ekonomi menyinggung sedikit pembahasan permasalahan keamanan global.

Kesimpulan

Politik luar negeri Bebas-Aktif Indonesia merupakan kebijakan yang unik dan langka. Untuk negara yang merdeka pada tahun 1945, Indonesia dianggap sebagai negara pionir dalam politik luar negeri yang bersifat non-blok. Pada konflik Palestina-Israel di tahun 2023, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan terlihat konsisten, yakni kebijakan-kebijakan dalam mendukung Palestina dan perdamaian di antara dua negara tersebut. Hal tersebut terlihat pada saat agresi Israel di Palestina tanggal 28 Juli 2023, Menlu membuat beberapa pernyataan yang isinya tentang kutukan dan kecaman terhadap aksi provokasi yang dilakukan oleh Israel yang dapat memperburuk stabilitas dan keamanan di Kawasan Timur Tengah. Dengan tegas Indonesia menyatakan jika aksi provokasi Menteri Israel di Kompleks Al-Aqsa sebagai pelanggaran hukum internasional dan *status quo* Jerusalem. Perbedaan respon pun terlihat saat Hamas melakukan serangan dadakan dari jalur Gaza ke arah kependudukan Israel di Palestina pada tanggal 7 Oktober 2023. Melalui Menlu, Indonesia hanya menggunakan kata “prihatin” sebagai respon serangan Hamas. Kata tersebut cenderung bersifat lebih diplomatis dibandingkan dengan respon Menlu terhadap Ben-Gvir saat melakukan kunjungannya ke Kompleks Al-Aqsa bulan Juli 2023 lalu yang cenderung memojokkan Israel dengan kata “mengecam” dan “mendesak”. Hal tersebut karena adanya *discourse* pro-palestina yang sudah ada sejak era Sukarno. Hal tersebut dikarenakan adanya solidaritas agama dari muslim di Indonesia, adanya *anti-colonialism sentiment* yang membekas dari sejarah bangsa Indonesia, serta agresifitas Jokowi pada program 4+1 yang berfokus pada pembenahan HAM masyarakat internasional.

Referensi

Buku

- Pamuk, Şevket, 2009. *The Ottoman Economy in World War I. The Economics of World War I*. Cambridge University Press.
- Al-Abid, Samih, *et al.*, 2018. *TWO STATES OR ONE? Reappraising the Israeli-Palestinian Impasse*. Rice University's Baker Institute for Public Policy and Carnegie Endowment for International Peace.
- Barnett, Michael, *et al.*, 2023. *The One State Reality: What Is Israel/Palestine?*. Cornell University Press.
- Sihbudi, R, 1997. *Indonesia dan Timur Tengah: Masalah dan prospek*. Gema Insani Press

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 1997. Jakarta: DPR RI.

Artikel Jurnal

- Alam, Mohammad Shekaib, 2017. "Islam and Diplomacy: The Quest for Human Security", *IAIS Malaysia & Pelanduk*.
- Elmusa, Sharif S., 1996. "The Land-Water Nexus in the Israeli-Palestinian Conflict", *Journal of Palestine Studies*. Published By: Taylor & Francis, Ltd.
- Lukens-Bull, R, M Woodward, 2011. "Goliath and David in Gaza: Indonesian myth-building and conflict as a cultural system", *Contemporary Islam*, 5(1): 1-17.
- Muzakki, Fadlan, 2017. "Theory, Practice, and Analysis of Indonesia's Foreign Policy". *Fellowship Graduate in International Relations at Zhejiang University, Hangzhou – Zhejiang, China*
- Modelski, G., 1963. "The New Emerging Forces: Documents on the Ideology of Indonesian Foreign Policy", Canberra: Department of International Relations, Australian National University.
- Muzakki, Fadlan, 2017. "Theory, Practice, and Analysis of Indonesia's Foreign Policy". *Fellowship Graduate in International Relations at Zhejiang University, Hangzhou – Zhejiang, China*.

- Modelski, G., 1963. "The New Emerging Forces: Documents on the Ideology of Indonesian Foreign Policy", Canberra: Department of International Relations, Australian National University.
- Strömbom, Lisa, Anders Persson, 2023. "The two-state impasse in Israel/Palestine—The EU caught between egalitarian norms and expansionist realpolitik", *Frontiers Media SA*.
- Vershinina, Valeria V. *et al.*, 2023. "Southeast Asian States' Approaches to Peacekeeping and Conflict Resolution", MGIMO University, Moscow, Russian Federation.
- Shadiqi, Muhammad Abdan *et al.*, 2020. "Support for Palestine Among Indonesian Muslims: Religious Identity and Solidarity as Reasons for E-Petition Signing", *Psychological Research on Urban Society*. Faculty of Psychology Universitas Indonesia.
- Wallach, J, 2011. "Trapped in mirror-images: The rhetoric of maps in Israel/Palestine", *Political Geography*, 30(7): 358–369.
- Yeremia, A E, 2020. "Sukarno and Colonialism: An Analysis of Indonesia's Foreign Policy Discourse, 1955-1961", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1): 1–18.

Artikel Daring

- CNN, 2023. "Pengertian, Tujuan, dan Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok" [Online]. Tersedia dalam <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230531155613-569-956338/pengertian-tujuan-dan-peran-indonesia-dalam-gerakan-non-blok> [diakses 23 Oktober 2023].
- Fikra Forum, 2018. "Religion and the Israel-Palestinian Conflict: Cause, Consequence, and Cure" [Online]. Tersedia dalam <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/religion-and-israel-palestinian-conflict-cause-consequence-and-cure> [diakses 23 Oktober 2023].
- CNN, 2023. "RI Kecam Menteri Israel ke Al Aqsa: Provokasi untuk Kesekian Kalinya" [Online]. Tersedia dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230729031315-106-979308/ri-kecam-menteri-israel-ke-al-aqsa-provokasi-untuk-kesekian-kalinya> [diakses 25 Oktober 2023].
- CNBC, 2023. "Israel Menggila di Jenin, Korban Jiwa Palestina Bertambah" [Online]. Tersedia dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230703151044-4-450783/israel-menggila-di-jenin-korban-jiwa-palestina-bertambah> [diakses 28 Oktober 2023].

- Safitri, Eva, 2023. "RI Kecam Aksi Provokasi Menteri Israel di Kompleks Al-Aqsa" [Online]. Tersedia dalam <https://news.detik.com/berita/d-6847349/ri-kecam-aksi-provokasi-menteri-israel-di-kompleks-al-aqsa> [diakses 28 Oktober 2023].
- Saleh, Rizki, 2014. "Diplomasi Pro Rakyat Jadi Prioritas Retno Marsudi" [Online]. Tersedia dalam <https://berita2bahasa.com/mb2b/berita/01/21392910-diplomasi-pro-rakyat-jadi-prioritas-menlu-retno-marsudi> [diakses 27 Februari 2024]
- Ghanim, Honaida, 2023. "A Soft "Status Quo": The Gradual Collapse of the Jewish Religious Prohibition on Entering Jerusalem's Noble Sanctuary" [Online]. Tersedia dalam <https://arabcenterdc.org/resource/a-soft-status-quo-the-gradual-collapse-of-the-jewish-religious-prohibition-on-entering-jerusalems-noble-sanctuary/> [diakses 28 Oktober 2023].
- Sella, Adam, 2023. "What does the 'status quo' mean at Jerusalem's Al-Aqsa Mosque?" [Online]. Tersedia dalam <https://www.aljazeera.com/news/2023/4/11/hldwhat-does-the-status-quo-mean-at-jerusalems-al-aqsa-mosque> [diakses 28 Oktober 2023].
- Subroto, Lukman, dan Widya L. Ningsih, 2022. OLDEFO dan NEFO: Pengertian, Perbedaan, dan Dampaknya [Online]. Tersedia dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2022/05/05/100000479/oldefo-dan-nefo--pengertian-perbedaan-dan-dampaknya?page=all> [diakses 2 Desember 2023]
- Teibel, Amy, 2023. "Palestinian death toll in West Bank surges as Israel pursues militants following Hamas rampage" [Online]. Tersedia dalam <https://apnews.com/article/israel-west-bank-gaza-militants-25b93d7eda4f2972360fe384d381bbff> [diakses 29 Oktober 2023].
- Robinson, Kali, 2023. "What is Hamas?" [Online]. Tersedia dalam <https://www.cfr.org/backgrounder/what-hamas> [diakses 4 November 2023].
- Kemensetneg, 2023. "Indonesia Tegaskan "Two State Solution" sebagai Solusi Perdamaian Palestina-Israel" [Online]. Tersedia dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_tegaskan_two_state_solution_sebagai_solusi_perdamaian_palestina_israel [diakses 4 November 2023].
- Beaumont, Peter, 2023. "Death toll rises to more than 1,100 after surprise Hamas attack on Israel" [Online]. Tersedia dalam <https://www.theguardian.com/world/2023/oct/08/israel-gaza-hamas-attack-netanyahu-warns-of-long-and-difficult-war> [diakses 4 November 2023].

- Al-Rujoub, Awad, 2023. "Pemukim Israelancam warga Palestina di Tepi Barat dengan pengusiran paksa" [Online]. Tersedia dalam <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pemukim-israel-ancam-warga-palestina-di-tepi-barat-dengan-pengusiran-paksa/3034190> [diakses 4 November 2023].
- DeBre, Isabel, 2023. "Netanyahu's judicial overhaul faces first legal challenge in Israeli Supreme Court" [Online]. Tersedia dalam <https://www.pbs.org/newshour/world/netanyahus-judicial-overhaul-faces-first-legal-challenge-in-israeli-supreme-court> [diakses 6 November 2023].
- Berg, Raffi, 2023. "Israel judicial reform explained: What is the crisis about?" [Online]. Tersedia dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-65086871> [diakses 6 November 2023].
- Allen, Sydney, 2023. "Malaysia and Indonesia throw support behind Palestinian cause" [Online]. Tersedia dalam <https://globalvoices.org/2023/10/17/malaysia-and-indonesia-throw-support-behind-palestinian-cause/> [diakses 6 November 2023].
- Hublu, (n.d.). "HUBUNGAN LUAR NEGERI" [Online]. Tersedia dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/438.pdf> [diakses 6 November 2023].
- Kemlu, 2018. "Indonesia's Foreign Policy" [Online]. Tersedia dalam https://kemlu.go.id/washington/en/pages/kebijakan_luar_negeri_ri/716/etc-menu [diakses 10 November 2023].
- Chen, J., Gleason, *et al.* 2014. "New perspectives on Indonesia: understanding Australia's closest Asian neighbour" [Online]. Tersedia dalam http://perthusasia.edu.au/usac/assets/media/docs/publications/E-Book_NewPerspectiveson-Indonesia_Understanding-Australias-Closest-Neighbour.pdf [diakses 10 November 2023].